

B

PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE LUAR NEGERI

(STUDI DESKRIPTIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGIRIMAN TENAGA
KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI DI PT. SURABAYA YUDHA
PRATAMA KOTAMADYA SURABAYA)

SKRIPSI

KK.
Fis. P. II / 99
klid
p.



MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

OLEH :

ARY WIDAYANTO

NIM : 079314020

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Semester Gasal 1998/1999

PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE LUAR NEGERI

**(STUDI DESKRIPTIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGIRIMAN TENAGA
KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI DI PT. SURABAYA YUDHA
PRATAMA KOTAMADYA SURABAYA)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

KK
Fis. P. 11/99
Wid
p.



OLEH :

ARY WIDAYANTO

NIM : 079314020

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A**

Semester Gasal 1998 / 1999

Kupersembahkan Kepada

Ayahanda Missidjab, Ibunda Soeharti

Ketiga kakakku Asis Widayanto, Asih Widayanti + keluarga, Arif Widayanto

Dan semua orang yang telah mengharapkan kesuksesanku

**PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)
KE LUAR NEGERI**

**(Studi Deskriptif Implementasi Kebijakan Pengiriman Tenaga Kerja
Indonesia Ke Luar Negeri Di PT. Surabaya Yudha Pratama
Kotamadya Surabaya)**

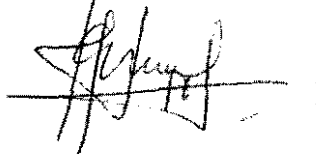
SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ARY WIDAYANTO
NIM 079314020

**Telah Disetujui untuk diujikan
Surabaya, 24 Desember 1998**

DOSEN PEMBIMBING



Dra. Dwi Windyastuti MA
NIP. 131 801 643

**PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)
KE LUAR NEGERI**

**(Studi Deskriptif Implementasi Kebijakan Pengiriman Tenaga Kerja
Indonesia Ke Luar Negeri Di PT. Surabaya Yudha Pratama
Kotamadya Surabaya)**

SKRIPSI

Dipresentasikan Oleh :

ARY WIDAYANTO
NIM 079314020

Dinyatakan **LULUS** Evaluasi Presentasi
Tgl 14 Januari 1999

Tim Penguji

1. Dra. Dwi Windyastuti MA
NIP. 131 801 643

Ketua

1.

2. Drs. Kacung Marijan MA
NIP. 131 836 623

Anggota

2.

3. Drs. Kris Nugroho MA
NIP. 131 801 408

Anggota

3.

ABSTRAKSI

Pengiriman TKI ke luar negeri merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi tingginya angka pengangguran di Indonesia. Peluang kerja di luar negeri dengan tawaran gaji yang cukup besar merupakan daya tarik, sehingga kemudian program pengiriman TKI ke luar negeri mengundang minat yang cukup besar dari masyarakat, hasil secara nyata adalah jumlah pengiriman TKI ke luar negeri dari propinsi Jawa Timur selama Pelita V yang lalu telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Sebagai sektor jasa yang memberikan devisa negara cukup besar, maka pemerintah melakukan upaya-upaya pengaturan dalam pengiriman TKI ini, yang dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Kebijakan tersebut telah beberapa kali mengalami pembaharuan. Dalam kebijakan yang terakhir yaitu Permenaker No 2 Tahun 1994 antara lain disebutkan bahwa operasional pelayanan pengiriman TKI ke luar negeri adalah pada Kantor Wilayah/Balai Akan dan Kandepnker setempat. Selain itu kerja sama dengan PJTKI sebagai mitra kerja adalah sangat penting.

Pengiriman TKI ke luar negeri ini pada gilirannya menjadi salah satu peluang yang menguntungkan bagi pihak swasta yaitu PJTKI, sehingga banyak sekali PJTKI-PJTKI yang berdiri. Semakin banyaknya PJTKI ini, pada kenyataannya belum sepenuhnya berfungsi sebagaimana mestinya, karena tetap saja ada PJTKI yang melakukan pelanggaran/penyimpangan. Sehingga timbulah kasus-kasus yang pada intinya merugikan pihak TKI. Ditambah lagi dengan adanya calo-calo tenaga kerja yang beroperasi secara illegal. Sebagai langkah untuk mengantisipasi hal ini perlu dilakukan pembinaan terhadap PJTKI-PJTKI yang ada secara rutin maupun insidental.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pengiriman TKI ke luar negeri, kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam implementasi kebijakan pengiriman TKI ke luar negeri dan siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam pelaksanaannya.

Berangkat dari suatu pemikiran tersebut diatas penelitian ini pada hakekatnya dilaksanakan untuk memperoleh suatu gambaran tentang keefektifan dari suatu pelaksanaan kebijakan dibidang ketenagakerjaan sebagai wujud nyata upaya pemerintah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan baru dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan TKI.